

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bangka Barat

Reisty Amelia¹; Dedi Budiman Hakim²; Feryanto³

Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor¹

Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor²

Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor³

**E-mail korespondensi: reistiyamelia@apps.ipb.ac.id*

Abstract

Property tax is a tax whose management has been transferred from the central government to regional governments as a follow-up to the regional autonomy policy. The regional autonomy policy will be successful if the regions have the financial capacity and ability to develop the potential that exists in the regions. The purpose of this study was to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying PBB-P2 in West Bangka Regency. The data analysis method of this study used multinomial logistic regression analysis with primary data sources obtained from 100 respondents. The results showed that the variables that influence the taxpayer's decision to pay taxes but not on time rather than not paying are age, education, income, and employment of government employees and tax services. The variables that influence the taxpayer's decision to pay taxes on time rather than not paying taxes are the work of government employees, tax sanctions, and tax services.

Keywords: *taxpayer compliance, multinomial logistic regression, property tax in rural and urban areas*

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dialihkan pengelolaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah akan berhasil jika daerah memiliki kemampuan keuangan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik multinomial dengan sumber data primer yang diperoleh dari 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak membayar pajak tapi tidak tepat waktu daripada tidak membayar adalah usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan pegawai pemerintah dan pelayanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak membayar pajak tepat waktu daripada tidak membayar pajak adalah pekerjaan pegawai pemerintah, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, regresi logistik multinomial, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

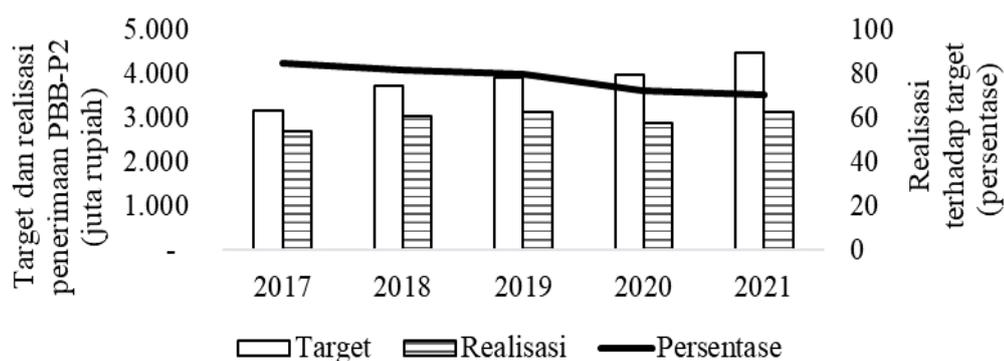
PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dianggap berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat oleh sebab itu, pajak dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga target penerimaan pajak diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Salah satu sumber pajak yang potensial untuk ditingkatkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dialihkan pengelolaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalihan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah akan berhasil jika daerah memiliki kemampuan keuangan daerah dan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang potensial sebagai sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan yang diselenggarakan pemerintah (Masitoh, 2018). Hal ini disebabkan dari segi basis pajak, PBB-P2 tidak memiliki mobilitas tinggi sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk memungutnya (anggoro & Agusti, 2019).

PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan kepada bumi/tanah dan bangunan karena adanya kepemilikan dan keuntungan dari objek pajak tersebut. Objek pajak PBB-P2 memiliki karakteristik yang banyak dan tetap dengan nilai yang naik setiap tahun (Kemenkeu, 2014). Hasil dari bagian objek PBB-P2 yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah untuk mensukseskan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak (Riskiana & Furqon, 2021). Selain itu kepatuhan wajib pajak menjadi kunci besar kecilnya penerimaan PBB-P2 yang diterima pada tahun berkenaan dan apabila belum mencapai target yang ditetapkan akan menyebabkan terganggunya perencanaan pembangunan di daerah.



Gambar 1. Target, realisasi dan persentase penerimaan PBB-P2 Tahun 2017-2021

Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bangka Barat untuk membayar PBB-P2 dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017-2021. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata sebesar 77,88 persen dengan persentase realisasi penerimaannya menurun yaitu tahun 2017 (84,8%), 2018 (81,56%), 2019 (79,59%) 2020 (72,34%) dan 2021 (70,12%). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2017) menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan realisasi pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yaitu wajib pajak belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Pendapat ini didukung juga oleh (Handayani *et al.* 2014) bahwa

beberapa faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu wajib pajak lupa membayar, tingkat pengetahuan, kesadaran rendah, dan tingkat pendapatan. Kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor yang berada di dalam manusia dan faktor dari pemerintah. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

METODE

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara kepada masyarakat. Waktu yang diperlukan dalam pengambilan dan pengolahan data adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober – Desember 2022. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok sebagai pusat kota dan pemerintahan. Penentuan sampel untuk wajib pajak/masyarakat menggunakan *stratified random sampling* sebanyak 100 responden. Responden dipilih berdasarkan klasifikasi kelas tanah/bumi.

Metode analisis regresi logistik multinomial digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan variabel respon (Y) yang memiliki 3 kategori yaitu wajib pajak membayar tepat waktu, wajib pajak membayar tapi tidak tepat waktu, wajib pajak tidak membayar pajak. Pada penelitian ini yang menjadi variabel referensi yaitu $Y=0$ wajib pajak tidak membayar pajak, sedangkan $Y=1$ wajib pajak membayar tapi tidak tepat waktu dan $Y=2$ wajib pajak membayar tepat waktu. Variabel Y yang memiliki tiga kategori maka akan membentuk dua persamaan logit yang masing-masing akan dibandingkan dengan kategori referensi. Berikut persamaan regresi logistik multinomial dalam penelitian ini.

$$g_1(x) = \log \frac{P(Y = 1|X)}{P(Y = 0|X)}$$

$$= \log \frac{\pi_1(x)}{\pi_0(x)} = \beta_0 + \beta_1 Usia + \beta_2 Pddk + \beta_3 Pdptn + \beta_4 Peggpm + \beta_5 Swta$$

$$+ \beta_6 Brh + \beta_7 Snksi + \beta_8 Pngth + \beta_9 Pelyn + \beta_{10} Sosia + \varepsilon$$

$$g_2(x) = \log \frac{P(Y = 2|X)}{P(Y = 0|X)}$$

$$= \log \frac{\pi_2(x)}{\pi_0(x)} = \beta_0 + \beta_1 Usia + \beta_2 Pddk + \beta_3 Pdptn + \beta_4 Peggpm$$

$$+ \beta_5 Swta + \beta_6 Brh + \beta_7 Snksi + \beta_8 Pngth + \beta_9 Pelyn$$

$$+ \beta_{10} Sosia + \varepsilon$$

Keterangan:

- g_1 : Persamaan logistik multinomial ke 1
- g_2 : Persamaan logistik multinomial ke 2
- $\frac{P(Y = 1|X)}{P(Y = 0|X)}$: Variabel respon, peluang wajib pajak membayar pajak tapi tidak tepat waktu (bernilai 1 jika wajib pajak membayar pajak tapi tidak tepat waktu dan bernilai 0 jika wajib pajak tidak membayar pajak)
- $\frac{P(Y = 2|X)}{P(Y = 0|X)}$: Variabel respon, peluang wajib pajak membayar pajak tepat waktu (bernilai 2 jika wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan bernilai 0 jika wajib pajak tidak membayar pajak)
- β_0 : Konstanta persamaan

- $\beta_1 \dots \beta_{10}$: Koefisien variabel prediktor
- Usia : Usia
- Pddk : Pendidikan
- Pdptn : Pendapatan
- Pegpem : Pekerjaan pegawai pemerintah
- Swta : Pekerjaan swasta
- Brh : Pekerjaan buruh harian/nelayan/petani
- Snksi : Sanksi perpajakan
- Pngth : Pengetahuan perpajakan
- Pelyn : Pelayanan perpajakan
- Sosia : Sosialisasi perpajakan
- ε : Error

Penjelasan dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu:

Tabel 1. Variabel penelitian dan definisi operasional

Variabel	Kategori	Definisi
Membayar PBB-P2 (Y)	0: Tidak membayar pajak 1: Membayar pajak tapi tidak tepat waktu 2: Membayar pajak tepat waktu	Variabel ini melihat wajib pajak memilih untuk membayar tagihan PBB-P2 secara tepat waktu, tidak tepat waktu dan tidak membayar
Usia (x_1) (Usia)		Usia individu/wajib pajak yang membayar PBB-P2 (tahun)
Pendidikan (x_2) (Pddk)		Lamanya pendidikan yang ditempuh oleh individu/wajib pajak (tahun)
Pendapatan (x_3) (Pdptn)		Gaji, honor, upah individu/wajib pajak keseluruhan setiap bulan (juta rupiah)
Pekerjaan (x_4)	1: Pegawai Pemerintah 2: Swasta 3: Buruh harian/petani/nelayan 4: Lainnya	Pekerjaan individu/wajib pajak yang tetap
Pekerjaan (x_{41}) (Pegpem)	0: Pegawai Pemerintah 1: Lainnya	
Pekerjaan (x_{42}) (Swta)	0: Swasta 1: Lainnya	
Pekerjaan (x_{43}) (Brh)	0: Buruh harian/petani/nelayan 1: Lainnya	
Sanksi Perpajakan (x_5) (Snksi)	0: Mengetahui sanksi perpajakan 1: Tidak mengetahui sanksi perpajakan	Pengetahuan individu/wajib pajak dalam mengetahui sanksi apabila tidak membayar atau terlambat membayar pajak

Variabel	Kategori	Definisi
Pengetahuan perpajakan (x_6) (Pngth)	0: Mengetahui 1: Tidak Mengetahui	Pengetahuan individu/wajib pajak dalam memahami fungsi pajak dan peraturan perpajakan
Pelayanan petugas pajak (x_7) (Pelyn)	0: Pelayanan baik 1: Pelayanan tidak baik	Individu/wajib pajak yang menerima pelayanan perpajakan
Sosialisasi (x_8) (Sosia)	0: Pernah/ada sosialisasi 1: Tidak pernah/ada sosialisasi	Individu/wajib pajak yang pernah/ikut/ada sosialisasi terkait PBB-P2

Sumber: Data diolah, 2022

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Usia diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau semakin tinggi usia maka semakin besar peluang untuk membayar PBB-P2.
2. Pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau semakin lama pendidikan yang ditempuh maka semakin besar peluang untuk membayar PBB-P2.
3. Pendapatan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau semakin tinggi pendapatan maka semakin besar peluang untuk membayar PBB-P2.
4. Pekerjaan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau pekerjaan yang baik maka semakin besar peluang untuk membayar PBB-P2.
5. Sanksi perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau wajib pajak yang mengetahui sanksi perpajakan memiliki peluang yang besar untuk membayar PBB-P2.
6. Pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak dan peraturan pajak memiliki peluang yang besar untuk membayar PBB-P2.
7. Pelayanan pajak diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau wajib pajak yang menerima pelayanan yang baik memiliki peluang yang besar untuk membayar PBB-P2.
8. Sosialisasi diduga berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 atau wajib pajak yang pernah mengikuti/menerima sosialisasi memiliki peluang yang besar untuk membayar PBB-P2.

Tahapan dalam analisis regresi logistik multinomial dilakukan dengan membentuk model regresi logistik multinomial, pengujian parameter secara simultan maupun parsial, dan menghitung nilai *odds ratio* untuk interpretasi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Hasil analisis regresi logistik multinomial untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari uji *likelihood* dan uji wald. Keputusan wajib pajak untuk

memilih membayar PBB-P2 sebagai variabel dependen terdiri dari pilihan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, membayar pajak tapi tidak tepat waktu dan wajib pajak tidak membayar pajak sebagai kategori pembanding.

Pengujian variabel dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari variabel independen yang secara serentak diduga memengaruhi variabel dependen pada keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Pada analisis regresi logistik multinomial untuk melihat hasil uji simultan dapat melihat *chi-square* atau *sig.* hipotesis yang digunakan untuk penarikan kesimpulan pengujian serentak adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen

H_1 : Minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen

Taraf $\alpha = 0,1$

Penarikan keputusan tolak H_0 jika $p\text{-value} < \alpha$

Dengan ketentuan tersebut, untuk mengambil keputusan pengujian secara serentak, dapat membandingkan nilai $p\text{-value}$ pada tabel 2.

Tabel 2. Pengujian parameter secara simultan

Model	Model Fitting Criteria		Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Nilai -p	
Intercept Only	173,441				
Final	118,616	54,825	28	0,000	

Sumber: Hasil olah data primer (2022)

Dapat dilihat pada Tabel 2 menunjukkan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha = 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa keputusannya adalah tolak H_0 yang berarti terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil pengujian serentak menghasilkan terdapat minimal satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen, untuk mengetahui variabel independen yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 dilakukan uji wald. Hipotesis yang digunakan untuk menarik kesimpulan pengujian adalah sebagai berikut:

H_0 : Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2

H_1 : Secara parsial variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2

Taraf $\alpha = 0,1$

Penarikan keputusan: tolak H_0 jika $p\text{-value} < \alpha$

Dengan ketentuan tersebut, untuk mengambil keputusan pengujian secara parsial, dapat membandingkan nilai $p\text{-value}$ pada tabel 3.

Tabel 3. Pengujian parameter secara parsial

Logit	Peubah	B	Wald	p-value	Exp(B)
Membayar tapi tidak tepat waktu (1)	Usia	0,102	5,157	0,023	1,107
	Pendidikan	0,379	4,170	0,041	1,461
	Pendapatan	0,000	2,968	0,085	1,000
	Pekerjaan (pegawai	5,935	8,065	0,005	378,127

Logit	Peubah	B	Wald	p-value	Exp(B)
	pemerintah)				
	Pekerjaan (swasta)	2,437	2,354	0,125	11,440
	Pekerjaan (buruh/nelayan/petani)	1,341	0,858	0,354	3,824
	Sanksi	0,877	0,646	0,421	2,405
	Pengetahuan	0,052	0,001	0,969	1,053
	Pelayanan	19,874	0,000	0,000	427693807,100
	Sosialisasi	13,764	0,002	0,968	949342,257
Membayar tepat waktu (2)	Usia	0,039	1,086	0,297	1,039
	Pendidikan	0,030	0,039	0,843	1,030
	Pendapatan	0,000	0,022	0,882	1,000
	Pekerjaan (pegawai pemerintah)	3,824	3,935	0,047	45,779
	Pekerjaan (swasta)	0,556	0,166	0,684	1,744
	Pekerjaan (buruh/nelayan/petani)	-0,164	0,017	0,897	0,849
	Sanksi	2,241	5,212	0,022	9,407
	Pengetahuan	-1,237	1,262	0,261	0,290
	Pelayanan petugas	3,231	4,840	0,028	25,293
	Sosialisasi	13,058	0,001	0,970	468767,650

Sumber: Data olah, 2022

Analisis regresi logistik multinomial dengan variabel dependen yang memiliki tiga kategori akan membentuk 2 fungsi logit. Fungsi logit tersebut yaitu logit 1 merupakan perbandingan antara keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu dan keputusan wajib pajak tidak membayar PBB-P2. Fungsi logit 2 merupakan perbandingan antara keputusan wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu dan keputusan wajib pajak tidak membayar PBB-P2.

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai *p-value* < 0,1 pada taraf nyata 10% dengan kriteria keputusan tolak H_0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel berpengaruh nyata. Variabel yang berpengaruh nyata pada logit 1 menunjukkan ada 5 variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan pegawai pemerintah dan pelayanan petugas. Sedangkan variabel yang berpengaruh nyata pada logit 2 menunjukkan ada 3 variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu pekerjaan pegawai pemerintah, mengetahui sanksi perpajakan dan pelayanan petugas.

Adapun variabel yang tidak berpengaruh pada logit 1 adalah pekerjaan swasta, pekerjaan buruh harian/nelayan/petani, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan pada logit 2 yang tidak berpengaruh yaitu usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan swasta, pekerjaan buruh harian/nelayan/petani, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi.

Penjelasan mengenai interpretasi masing-masing variabel independen kedua logit diinterpretasi melalui nilai Exp(B) atau *Odds Ratio*, Interpretasi masing-masing variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usia

Pada logit 1 usia berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* sebesar 1,107, artinya setiap kenaikan usia satu tahun peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu sebesar 1,107

kali dibandingkan dengan keputusan wajib pajak tidak membayar pajak. Semakin tinggi usia, wajib pajak cenderung membayar pajak tidak tepat waktu. Pada logit 2 usia tidak berpengaruh secara nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2.

Semakin bertambah usia wajib pajak akan semakin patuh membayar PBB-P2. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari (Kartikasari dan Estiningrum 2022) usia berpengaruh positif dan signifikan artinya semakin bertambah usia wajib pajak, semakin untuk menghindari tindakan yang berdampak negatif seperti terkena sanksi. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang berusia lebih tua lebih takut terkena sanksi daripada usia muda. Penelitian dari (Nim *et al.* 2019) juga menjelaskan bahwa semakin bertambah usia akan semakin terikat didalam komunitas masyarakat sehingga akan menghindari tindakan-tindakan yang memberikan kesan buruk dimasyarakat sedangkan usia yang lebih muda akan berani mengambil risiko dan kurang sensitif terhadap hukuman.

Pendidikan

Pada logit 1 pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* sebesar 1,461, artinya setiap peningkatan lama pendidikan satu tahun peluang keputusan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu sebesar 1,461 kali dibandingkan dengan keputusan wajib pajak tidak membayar pajak. Semakin lama pendidikan yang ditempuh maka peluang untuk membayar pajak lebih tinggi. Pada logit 2 pendidikan tidak berpengaruh secara nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2.

Semakin lama pendidikan yang ditempuh oleh seseorang akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dari (Syahputri *et al.* 2014) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan yang artinya semakin tinggi pendidikan wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan untuk membayar PBB lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Wajib pajak yang menempuh pendidikan yang lama akan lebih mengerti, berpengetahuan lebih banyak, terampil, bertanggung jawab dan akan lebih sadar terhadap kewajiban (Nim *et al.* 2019). Sehingga semakin tinggi pendidikan yang diperoleh maka akan semakin patuh membayar PBB-P2.

Pendapatan

Pada logit 1 pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* sebesar 1,000, artinya setiap peningkatan pendapatan sebesar satu juta peluang keputusan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu sebesar 1,000 kali dibandingkan dengan keputusan wajib pajak tidak membayar pajak. Semakin tinggi pendapatan maka peluang untuk membayar pajak lebih tinggi. Pada logit 2 pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari (Helni dan Afriani 2021) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap keinginan membayar pajak artinya semakin tinggi pendapatan seseorang maka semua kebutuhan akan terpenuhi termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Masyarakat yang berpendapatan rendah akan kesulitan untuk membayar pajak karena mereka lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebelum membayar pajak. Dengan demikian, tingkat pendapatan akan memengaruhi masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pekerjaan

Variabel pekerjaan terdiri dari 4 kategori yaitu pegawai pemerintah, swasta, buruh harian/nelayan/petani dan lainnya sebagai kategori pembanding. Variabel pegawai pemerintah, pada logit 1 dan logit 2 pekerjaan pegawai pemerintah berpengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* pekerjaan pegawai

pemerintah pada logit 1 sebesar 378,127, artinya wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu sebesar 378,127 kali dibandingkan dengan wajib pajak yang bekerja lainnya. Nilai *odds ratio* pekerjaan pegawai pemerintah pada logit 2 sebesar 45,779, artinya wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tepat waktu sebesar 45,779 kali dibandingkan dengan wajib pajak yang bekerja lainnya. Pada logit 1 dan logit 2 pekerjaan swasta tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Pada logit 1 dan logit 2 pekerjaan buruh harian/nelayan/petani tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2.

Jenis Pekerjaan seseorang menentukan kepatuhan membayar PBB-P2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kartikasari dan Estiningrum 2022) bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dimana perbedaan jenis pekerjaan akan memengaruhi tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan pendapat dari (Pasaribu dan Tjen 2015) perbedaan jenis pekerjaan wajib pajak antara bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, pensiunan dan lainnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan

Pada logit 1 sanksi pajak tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Pada logit 2 sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* sanksi perpajakan sebesar 9,407, artinya wajib pajak yang mengetahui sanksi pajak peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tepat waktu sebesar 9,407 kali dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mengetahui sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asriyani dan Susena 2016) sanksi pajak merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak yaitu berupa sanksi administrasi dan denda sehingga wajib pajak merasa harus membayar pajak sebelum dikenakan sanksi. Pernyataan ini sama dengan penelitian dari (Purnamasari *et al.* 2017) wajib pajak menyadari pembayaran setelah jatuh tempoh akan dikenakan denda sehingga wajib pajak sadar ketika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Pemberian sanksi dan masyarakat mengetahui adanya sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengetahuan perpajakan

Pada logit 1 dan logit 2 pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2.

Pelayanan petugas

Pada logit 1 dan logit 2 pelayanan petugas berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wajib pajak membayar PBB-P2. Nilai *odds ratio* pelayanan petugas pada logit 1 sebesar 427693807,1, artinya wajib pajak yang menerima pelayanan petugas dengan baik peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tapi tidak tepat waktu sebesar 427693807,1 kali dibandingkan dengan wajib pajak yang menerima pelayanan petugas tidak baik. Nilai *odds ratio* pelayanan petugas pada logit 2 sebesar 25,293, artinya wajib pajak yang menerima pelayanan petugas dengan baik peluang keputusan untuk membayar PBB-P2 tepat waktu sebesar 25,293 kali dibandingkan dengan wajib pajak yang menerima pelayanan petugas tidak baik

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan seseorang untuk membayar pajak. Samahalnya penelitian dari (Setiaji dan Nisak 2017) menyatakan pelayanan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P2. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak ditentukan dari pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Semakin baik pelayanan dan sesuai keinginan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan membayar PBB-P2 (Riskiana dan Furqon 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak membayar pajak tidak tepat waktu daripada tidak membayar adalah usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan pegawai pemerintah dan pelayanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak membayar pajak tepat waktu dibandingkan tidak membayar pajak adalah pekerjaan pegawai pemerintah, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak.

Saran

Adanya pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada wajib pajak agar mereka patuh dan bersedia membayar pajak yang dilakukan melalui sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan dari pemerintah daerah. Perlunya penelitian lanjutan yang lebih spesifik berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 agar adanya penambahan variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., & Agusti, R. R. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. Malang: UB Press.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4 (2), 136 - 145.
- Handayani, W. T., Santoso, S., & Sohidin. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe)*, 2, 224 - 237.
- Herlin, & Afriani, S. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keinginan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. *Jurnal AKTUAL*, 19 (2), 48 - 61.
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1), 83 - 92.
- Kemenkeu RI. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Masitoh, S. (2018). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nim, I. N., Yuesti, A., & Sudiartana, M. (2019). Pengaruh Umur, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Sains, Akuntansi dan*

- Manajemen (JSAM)*, 1(3), 408-449. doi:<https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.68>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI)*, 1 (2), 146 - 162.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14 (1), 22 - 39. doi:<https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39>
- Rahman, F. A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makasar. *Jurnal Economix*.
- Riskiana, N., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3, 54-61.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi : EKUITAS*, 5 (2).
- Syahputri, M. S., Ariswoyo, S., & Sinulingga, U. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak PBB (Pajak Bumi Bangunan). *Jurnal Saintia Matematika*, 2 (3), 201 - 211.